

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Pada Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah)

¹Rani Mutihawadi, ²M. Ariy Dermawan S, ³Iving Arisdityoto
¹²prodi Adiministrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram
³prodi Adiministrasi Publik, Universitas Tanjungpura

Article Info

Article history:

Received : 03 Juni 2023

Publish : 05 July 2023

Keywords:

Strategi, Pemda, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Ntb

Info Artikel

Article history:

Diterima : 03 Juni 2023

Publis : 05 Juli 2023

Abstract

This Study Aims To Determine The Strategy Of The West Nusa Tenggara Provincial Government In Increasing Local Own Revenue (Pad) Through Motorized Vehicle Taxes And To Determine The Supporting And Inhibiting Factors Of Motorized Vehicle Tax Revenue. The Type Of Research Used Is Descriptive With A Qualitative Approach. Source Of Data Obtained From Primary Data And Secondary Data. Data Collection Techniques Used Are Observation, Interviews And Documentation. The Results Of The Study Show That The Strategy For Increasing Pad At The Ntb Province Regional Revenue Agency Is Carried Out In Several Stages, Namely 1) Intensification Of Local Taxes Starting With The Application Of Guidelines, Dissemination Of Regulations Related To Regional Taxes, And Implementation Of Monitoring. 2) Extensification Of Taxpayers By Exploring New Tax Objects Or Subjects Or Those That Have Not Been Registered With The Administration. 3) Institutional Strengthening. As For The Inhibiting Factors Of Motorized Vehicle Tax Revenue, Namely Technical Gaps In Taxpayer Services, Payments Through Banks, Motorized Vehicle Tax Payments With An Online System, Inaccurate Data On Motorized Vehicle Tax Ownership Notification Letters (Spkpkb) And Lack Of Public Awareness In Paying Taxes.

Abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Serta Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif. Sumber Data Diperoleh Dari Data Primer Dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Adalah Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Strategi Peningkatan Pad Pada Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah Provinsi Ntb Dilakukan Dengan Beberapa Tahap, Yaitu 1) Intensifikasi Pajak Daerah Dimulai Dengan Penerapan Pedoman, Sosialisasi Peraturan Terkait Pajak Daerah, Dan Pelaksanaan Pemantauan. 2) Ekstensifikasi Wajib Pajak Dengan Menggali Objek Atau Subjek Pajak Yang Baru Atau Yang Belum Terdaftar Di Adiministrasi. 3) Penguatan Kelembagaan. Adapun Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Yaitu Kesenjangan Teknis Dalam Pelayanan Wajib Pajak, Pembayaran Melalui Bank, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sistem Online, Data Surat Pemberitahuan Kepemilikan Pajak Kendaraan Bermotor (Spkpkb) Yang Kurang Akurat Dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Rani Mutihawadi

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: Ariydermawan@gmail.Com

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus keperluan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah daerah dapat memaksimalkan anggaran yang dimilikinya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut. Upaya atau strategi yang dimaksudkan ini menjadi hak bagi daerah yang kemudian antara satu daerah dengan yang lainnya akan berbeda-beda.

Problematika dewasa ini adalah lemahnya kemampuan daerah untuk memaksimalkan PAD. Adapun penyebab utama rendahnya PAD adalah; pertama, kurangnya pendapatan dari perusahaan daerah; kedua, tingginya sentralisasi perpajakan; ketiga, munculnya disintegrasi dan separatisme jika pendapatan daerah tinggi; keempat,

Pemerintah Memberikan Subsidi Yang Sedikit Kepada Pemerintah Daerah. Lemahnya Kemampuan Daerah Dalam Meningkatkan Pad Ini Pada Akhirnya Akan Dapat Berdampak Secara Serius Pada Daerah Itu Sendiri. Di Saat Daerah Tidak Mampu Mendapatkan Pad Yang Besar, Maka Kemandirian Daerah Dapat Dipertanyakan. Dengan Kata Lain Ketergantungan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat Sangat Tinggi. Di Samping Itu, Kurang Maksimalnya Pad Juga Dapat Berpengaruh Kepada Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah. Buruknya Pertumbuhan Ekonomi Tentunya Merupakan Permasalahan Yang Cukup Serius Bagi Daerah.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu (Rahmat Nur, 2020) Menyatakan Bahwa Peningkatan Pad Merupakan Concern Daerah Yang Terus Di Upayakan. Tidak Sedikit Daerah Di Indonesia Memiliki Permasalahan Dalam Meningkatkan Pad Mereka. Hal Ini Senada Dengan Yang Di Jelaskan Dalam Penelitian Terdahulu Yang Lainnya (Ester Rompis, 2015) Bahwa Pemerintah Memberikan Perhatian Terhadap Pad. Berbagai Cara Dilakukan Pemerintah Daerah Agar Pad Mereka Dapat Ditingkatkan.

Kita Ketahui Bersama Bahwa Sumber Dari Pad Adalah Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah, Dan Semua Hal Yang Diakui Sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih Pada Periode Tertentu Di Daerah. Salah Satu Daerah Yang Turut Berupaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb). Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Hal Ini Melaksanakan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor Sendiri Adalah Atas Kepemilikan Dan Atau Penguasaan Kendaraan Bermotor (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Kendaraan Bermotor Yang Di Pungut Pemerintah Nusa Tenggara Barat Ini Sejak Tahun 2016 Hingga Tahun 2020 Selalu Melampaui Target Yang Ditetapkan. Sebagai Gambaran Yang Lebih Jelas Berikut Tabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Ntb:

Tabel 1

Capaian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Ntb Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2016	248.153.000.000	269.187.973.631	108,48%
2017	311.893.723.935	324.423.070.254	104,02%
2018	362.500.000.000	389.092.415.685	107,34%
2019	407.690.000.000	437.162.593.976	107,23%
2020	407.690.000.000	520.080.000.000	112,99%

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah Prov. Ntb, Tahun 2020

Strategi-Strategi Yang Digunakan Pemerintah Ntb Untuk Mengumpulkan Penerimaan Dari Pajak Kendaraan Bermotor Ini Antara Lain Adalah Samsat Seluler, Pengiriman Samsat, Serta Samsat *Zero Waste*. Di Samping Itu Pemerintah Juga Terus Berupaya Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Untuk Menumbuhkan Kesadaran Untuk Membayar Pajak Tersebut. Karena Masyarakat Merupakan Elemen Utama Dan Terpenting Dalam Penerimaan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Uraian Tersebut Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahu Bagaimana Strategi Diterapkan Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Meningkatkan Pad Melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Jenis Penelitian Deskriptif, Dengan Pendekatan Kualitatif. Penelitian Kualitatif Adalah Metode Penelitian Yang Digunakan Pada Kondisi Obyek Yang Alamiah, Dimana Peneliti Sebagai Instrumen Kunci, Teknik Pengumpulan Data Dilakukan Secara Triangulasi, Analisis Data Bersifat

Induktif, Dan Hasil Penelitian Lebih Menekankan Makna Daripada Generalisasi (Sugiyono, 2012). Penggunaan Metode Kualitatif Deskriptif Bertujuan Untuk Memberikan Deskripsi Serta Mendapatkan Gambaran Yang Jelas Yang Berguna Untuk Menjawab Rumusan Masalah, Yaitu Mengenai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam Penelitian Ini, Peneliti Menggunakan Metode Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*) Terhadap Informan Yang Memiliki Hubungan Dengan Penelitian Ini (Sugiyono, 2012). Pengumpulan Data Dilakukan Melalui Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi. Instrumen Penelitian Adalah Peneliti Sendiri, Pedoman Wawancara, Catatan Lapangan, Dan Alat Perekam. Analisis Data Menggunakan Model Interaktif Menurut Miles, Huberman Dan Saldana. Model Interaktif Melalui Empat Tahap, Yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Dan Menarik Kesimpulan (Miles, Huberman Dan Saldana, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pad Merupakan Bagian Penting Dari Apbd. Jika Pad Terus Meningkatkan, Kemungkinan Besar Apbd Juga Demikian. Untuk Memastikan Bahwa Pad Terus Memberikan Kontribusi Yang Berarti Bagi Apbd Dari Waktu Ke Waktu, Penting Agar Daerah Bekerja Sama Untuk Meningkatkan Tingkat Pad . Terdapat Tiga Cara Yag Dilakukan Pemprov Ntb Dalam Meningkatkan Pad Melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Yaitu Intensifikasi Pendapatan, Ekstensifikasi Pendapatan Dan Penguatan Kelembagaan.

Intensifikasi Pendapatan

Mengintensifikan Pemungutan Pajak Penghasilan Merupakan Kegiatan Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Penerimaan Dari Wajib Pajak Terdaftar. Proses Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah Dimulai Dengan Menerbitkan Pedoman, Mensosialisasikan Peraturan Yang Terkait Dengan Pajak Daerah, Mengawasi Dan Melakukan Pemeriksaan Untuk Memastikan Wajib Pajak Mengikuti Peraturan Dan Ketentuan Yang Terkait Dengan Pajak Daerahnya. Dalam Hal Intensifikasi, Bappenda Provinsi Ntb Melakukan Penelitian Yang Hasilnya Menunjukkan Bahwa Bahwa Optimalisasi Intensifikasi Dapat Berdampak Pada Peningkatan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun Pendukung Intensifikasi Dalam Peningkatan Pad Adalah; Operasi Gabungan Di Tiap Uptb, Surat Teguran, Meningkatkan Akses Dan Jam Layanan, Samsat Keliling Dan Samsat *Zerowaste*. Dari Penelitian Yang Penulis Lakukan, Ditemukan Bahwa Efektifitas Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Ntb Cukup Baik. Hal Ini Tercermin Dari Capaian Atau Realisasi Atas Target Yang Ditetapkan Mulai Tahun 2016 Sampai Dengan 2020 Yang Baik (Lihat Tabel 1).

Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi Merupakan Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Wajib Pajak Baru Dengan Melakukan Penanaman Modal Bekerjasama Dengan Perusahaan Swasta Dan Pemerintah Daerah. Bappenda Provinsi Ntb Mengkhususkan Diri Pada Optimalisasi Pematangan Pajak Dengan Memperluas Subjek Wajib Pajak. Sehingga Hal Ini Berdampak Positif Pada Peningkatan Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Penguatan Kelembagaan

Penguatan Kelembagaan Merupakan Cara Untuk Meningkatkan Kemampuan Lembaga, Sistem, Dan Individu Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi. Upaya Penguatan Kelembagaan Oleh Bapenda Provinsi Ntb Agar Terjadinya Peningkatan Pelayanan Dilakukan Dalam Berbagai Bentuk, Seperti Perluasan Jaringan Pelayanan, Pengembangan Inovasi Pelayanan Baru, Dan Penambahan Petugas Pajak Ke Provinsi Setiap Tahunnya. Penulis Juga Menemukan Bahwa Penguatan Bappenda Pemprov Ntb Dilaksanakan Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dan Perluasan Pelayanan Yang Telah Dimutakhirkan Menjadi Sistem Online. Sedangkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Diprioritaskan Dengan Pelatihan Yang Diberikan Dan Penambahan Karyawan Setiap Tahunnya. Dengan Baiknya

Kelembagaan, Maka Kinerja Dari Birokrasi Dapat Meningkatkan. Dalam Hal Ini Akan Berdampak Pada Kemudahan Yang Di Dapatkan Oleh Masyarakat, Khususnya Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga Pada Akhirnya Akan Berdampak Pada Peningkatan Pad.

Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Terdapat Dua Faktor Yang Menjadi Penghambat Penerimaan Pakak Kendaraan Bermotor, Yaitu Faktor Internal Dan Faktor Eksternal.

Faktor Internal

Beberapa Hal Yang Menjadi Penghambat Secara Interbal, Yaitu Pertama, Kesenjangan Teknis Dalam Pelayanan Wajib Pajak. Semua Aspek Pembayaran Pkb Septutnya Ditangani Oleh Komputer, Termasuk Input Data, Pengeditan, Penetapan, Pembayaran Dan Pendistribusian Serta Pengarsipan. Namun, Pekerjaan Manual Masih Dilakukan Oleh Mitra Kerja Polisi. Kedua, Pembayaran Melalui Bank. Wajib Pajak Dapat Melakukan Pembayaran Melalui Bank Atau Sistem Perbankan Yang Ditunjuk, Seperti Bank Untuk Membayar Pajaknya, Namun Pembayaran Tersebut Tetap Harus Dilakukan Melalui Uptd/Samsat Setempat. Ketiga, Pembayaran Pkb Dengan Sistem *Online*. Dengan Adanya Sistem Online Dimana Wajib Pajak Dapat Membayar Pkb Di Uptd/Samsat Se-Ntb, Merupakan Langkah Maju Dalam Memberikan Pelayanan Yang Nyaman Dan Efisien Kepada Masyarakat Wajib Pajak. Namun Karena Terbatasnya Cakupan Layanan Pembayaran Pkb Online, Kebijakan Ini Dirasa Kurang Efektif Untuk Mencakup Semua Jenis Kebutuhan Pembayaran Pkb. Misalnya, Perubahan Stnk Wajib Pajak (Seperti Mengganti Stnk Lama Dengan Yang Baru) Tidak Bisa Dilakukan Melalui Sistem Online. Keempat, Data Surat Pemberitahuan Kepemilikan Pajak Kendaraan Bermotor (Spkpkb) Yang Kurang Akurat. Spkpkb Adalah Surat Yang Dikirimkan Kepada Wajib Pajak Yang Memberitahukan Jumlah Pajak Yang Terutang, Serta Tanggal Jatuh Tempo. Terkadang Informasi Dalam Spkpkb Tidak Akurat, Karena Program Komputer Data Base Samsat Terkadang Kurang Sempurna Dalam Memproses Pembayaran Pajak.

Faktor Eksternal

Faktor Eksternal Yang Menghambat Keberhasilan Uptd Bappenda Provinsi Ntb Dalam Melaksanakan Pajak Kendaraan Bermotor, Yaitu Kesadaran Masyarakat Yang Masih Rendah Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan Yang Dapat Penulis Berikan Dari Karya Ini Adalah Bahwa Terdapat Strategi Yang Dilakukan Oleh Bappenda Provinsi Ntb Untuk Meningkatkan Pad Melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Yaitu Intensifikasi, Ekstensifikasi Dan Melakukan Penguatan Kelembagaan. Dari Ketiga Hal Tersebut Menunjukkan Bahwa Telah Berhasil Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor Di Ntb. Kemudian Terdapat Faktor Penghambat Dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Ini, Yaitu Faktor Internal Dan Faktor Eksternal. Secara Internal Pertama Terdapat Kesenjangan Teknis Dalam Pelayanan Wajib Pajak, Kedua Pembayaran Pajak Tidak Tersentra Pada Bank Saja, Melainkan Masih Harus Melalui Kantor Samsat Sehingga Hal Ini Menjadi Tidak Efisien, Ketiga Terbatasnya Cakupan Layanan Pembayaran Pkb Online, Keempat Informasi Dalam Spkpkb Tidak Akurat, Karena Program Komputer Data Base Samsat Terkadang Kurang Sempurna Dalam Memproses Pembayaran Pajak. Adapun Faktor Eksternal Adalah Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Saran

Saran Yang Dapat Penulis Berikan Adalah Perlunya Sosialisasi Yang Lebih Baik Dan Rutin Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Ntb Terkait Pajak Kendaraan Bermotor Tersebut. Selain Itu Diperlukan Juga Pemutakhiran Sistem Yang Digunakan Dalam Layanan Pajak Agar

Tidak Terjadi Lagi Kesalahan Data Sehingga Dapat Mempermudah Yang Lebih Egektif Dan Efisien.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arenawati. 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah Konsep Dan Penatalaksanaan Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Miles, Mathew B., Michael Huberman & Johnny Saldana 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Editioni*. London: Sage Publication Ltd
- Nur, I. R. 2020, 'Efektifitas Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Pulau Lombok (Study Di Bappenda Provinsi Ntb)' (Doctoral Dissertation, Universitas Mataram)
- Rompis, N. E. 2015, 'Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado, Hal 1-12.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R Dan D*, Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009